

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada dasarnya setiap negara didunia memiliki kepentingan nasional yang harus dicapai, namun tidak jarang terjadi benturan kepentingan yang membuat sistem internasional semakin kompleks. AS dimasa administrasi Trump semakin menegaskan statusnya sebagai great power dengan mengeluarkan kebijakan *Freedom of Navigation*, khususnya di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Perhatian terhadap kebijakan ini semakin di fokuskan di LTS mengingat bahwa kekuatan Tiongkok yang semakin meningkat di wilayah tersebut. Tercatat bahwasanya operasi FON di LTS di tahun 2017-2021 merupakan operasi tertinggi daripada operasi sebelumnya, hal ini menandakan bahwa melalui kebijakan FON AS mencoba untuk mencapai kepentingannya yang dijelaskan melalui konsep Kepentingan Nasional oleh Nuechterlein.

Nuechterlein menjelaskan bahwa negara dalam merumuskan suatu kebijakan didasarkan kepada empat kepentingan, yang mana kepentingan tersebut akan dilihat seberapa besar intensitasnya dengan beberapa skala kepentingan. Dapat dilihat kepentingan AS di LTS pertama, Kepentingan pertahanan, AS masa Donald Trump telah berupaya meningkatkan kapabilitas militer khususnya militer angkatan laut. Hal ini dilakukan dengan melakukan penambahan personel dan juga penambahan kapal serta meningkatkan anggaran untuk militer pertahanan, dengan upaya tersebut AS dapat memaksimalkan kinerja FON untuk menjaga stabilitas perdamaian wilayah maritim. Kedua, kepentingan ekonomi AS melalui kebijakan FON adalah untuk menjaga wilayah LTS yang menyandang

status sebagai SLOT (Sea Lines of Trade). Letaknya yang strategis menjadikan LTS sebagai wilayah pelayaran perdagangan global, tercatat bahwa aktivitas perdagangan AS ke Asia melewati wilayah perairan LTS. Dengan adanya FON maka AS berusaha untuk menjaga jalur laut agar dapat tetap diakses tanpa ada hambatan, di mana nilai perdagangan yang melakukan transit di LTS mencapai nilai \$5,3 Triliun per tahun. Kondisi ini menjadikan kepentingan ekonomi diukur dengan skala *major issues*, di mana kepentingan ini tidak sampai membuat ancaman fisik terhadap AS.

Ketiga, aspek kepentingan tatanan dunia dari penerapan kebijakan FON di LTS terlihat dari bagaimana AS mencoba menjaga wilayah perairan internasional, untuk tetap dapat diakses oleh semua negara. Mengingat konflik perebutan klaim dilakukan oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara telah menyebabkan krisis stabilitas keamanan bersama, mendorong AS untuk memaanuver di wilayah tersebut untuk menjaga keamanan wilayah perairan. Keadaan ini terjadi akibat adanya benturan kepentingan atas status wilayah di LTS dapat mengancam kedaulatan AS, ditambah dengan peningkatan pasukan militer Tiongkok yang semakin intensif di wilayah tersebut. Keempat, kepentingan ideologi dari kebijakan FON telah tercermin dari visi misi perumusan kebijakan ini secara historis. Di mana AS menginginkan adanya hak kebebasan bagi semua orang untuk dapat mengakses wilayah laut internasional tanpa menerima adanya intervensi dari negara lain. Selain itu di masa Donald Trump kepentingan ini semakin jelas melalui strategi *Open-Indo Pacific* di kawasan tersebut.

5.2 Saran

Kepentingan AS di LTS dengan mengeluarkan kebijakan FON pada dasarnya telah menimbulkan pro dan kontra dalam sistem internasional. Keterlibatannya di wilayah tersebut mencerminkan bahwa terdapat upaya AS dalam mencapai kepentingannya dan telah mendapat dukungan dari sekutunya di wilayah Asia Tenggara. Upaya untuk menjaga stabilitas perairan internasional pada dasarnya belum mampu menjadi alasan kuat untuk menjawab pertanyaan dunia mengenai pelaksanaan FON di LTS. Untuk itu menurut saya penting bagi AS untuk menegaskan kembali posisinya di wilayah LTS melalui operasi kebijakan FON, dan juga penting bagi AS untuk menimbang kembali tujuannya mengingat AS tidak meratifikasi UNCLOS sebagai hukum internasional. Selain itu untuk menjaga stabilitas dan meredam ketegangan di wilayah LTS, AS dapat menurunkan skala pelaksanaan FON di wilayah tersebut.

